

## Pemetaan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kawasan Timur Jawa Timur Berbasis Sistem Informasi Geografi

Taufik Kurrohman<sup>1</sup>

### *Abstract*

*Local government financial reports (LGFR) is an information which contains data about the wealth of economic activity results from a government within a single budget period. Results from the recording of those statements is a description of achievements in the framework of public finance management. This study aimed to identify areas of financial management performance based on the identification of opinions, findings, and recommendations given by the BPK RI on examination of the financial statements of local districts and cities in "East area" in East Java Province from 2006 until the 2008 budget year using GIS. The results showed a fluctuating performance towards achievement of the opinions, findings, and recommendations of the examination results of local government financial reports on each district and town in "East area" in East Java. This is demonstrated by comparing the achievement opinions, findings, and recommendations among the counties and cities during the three-year budget.*

*Keywords: LKPD, Opinion, Findings.*

### 1. Pendahuluan

Dalam era otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan tujuan untuk lebih mendekatkan masyarakat dengan pemerintah, memudahkan masyarakat untuk memantau penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta meningkatkan kreativitas dan inovasi daerah untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing melalui persaingan yang sehat antar daerah. Melalui otonomi daerah daerah mempunyai hak untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD ke DPRD masing-masing. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah tersebut harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (1) E UUD 1945 (Perubahan Ketiga) yang menyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Propinsi Jawa Timur memiliki 38 pembagian daerah, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Dari 38 daerah tersebut terdapat 9 daerah di bagian timur

---

<sup>1</sup>Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Jatim yang dikenal dengan daerah Kawasan Timur. Daerah tersebut memiliki karakteristik budaya yang hampir sama berikut potensi alamnya. Tiap-tiap kabupaten atau kota di daerah Kawasan Timur sebagaimana di kabupaten lain dituntut untuk mampu mengelola serta mempertanggungjawabkan keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas daerah yang mampu mengelola serta mempertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya antara lain: Sumiyati (2006) tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Masa Transisi menghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan dapat dihasilkan dengan cara konversi dari laporan yang dihasilkan dari tata cara penatausahaan keuangan daerah yang belum diatur dalam SAP dengan catatan bahwa konversi ini bisa dilaksanakan dengan baik jika memahami sistem yang ada dan juga memahami SAP. Prihatiningtyas (2008) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso menghasilkan penelitian bahwa Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tidak berpengaruh terhadap posisi keuangan dan kondisi pemerintahan Kabupaten Bondowoso. Wibisono, et.al (2009) mengupas tentang laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur menghasilkan beberapa karakteristik laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, masih belum ada topik mengenai laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan pemetaan dengan pendekatan Geographic Information System (GIS) dan data tabulasi atas data-data laporan hasil penelitian BPK RI. Dengan adanya pemetaan dan tabulasi data tersebut memberikan gambaran secara jelas tentang bagaimana kondisi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun sehingga akan bisa diketahui perbandingan antar tahun yang diperbandingkan.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah zona LKPD dengan GIS atas opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di daerah Kawasan Timur Jawa Timur selama tahun anggaran 2006-2008?
2. Bagaimanakah pemetaan melalui matriks atas temuan-temuan yang di peroleh dari hasil identifikasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di daerah Kawasan Timur Jawa Timur selama tahun anggaran 2006-2008?

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan zonasi melalui pendekatan GIS dari hasil pemetaan opini yang diberikan oleh BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di daerah Kawasan Timur Jawa Timur selama tahun anggaran 2006-2008
2. Untuk menjelaskan pemetaan melalui GIS dan matriks dari hasil identifikasi temuan-temuan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di daerah Kawasan Timur Jawa Timur selama tahun anggaran 2006-2008

## **4. Metoda Penelitian**

### **4.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metoda penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan, menyiapkan, serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas obyek yang diteliti. Metoda ini digunakan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005 dalam Puspa, 2008)

### **4.2 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam peneliian ini adalah data skunder yang berupa data runtut waktu (*Time series*), yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan yang telah di serahkan oleh pemerintah daerah kepada BPK untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota di daerah Kawasan Timur Jawa Timur tahun anggaran 2006-2008.

Sumber data diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan data LHP Kabupaten/Kota di daerah Kawasan Timur Jawa Timur, maka akan bisa diperoleh informasi mengenai keadaan laporan keuangan pemerintah daerah, temuan-temuan atas pemeriksaan BPK, serta opini untuk tiap-tiap Kabupaten/Kota di daerah Kawasan Timur Jawa Timur selama periode waktu yang ditentukan oleh peneliti.

### **4.3 Objek Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah daerah Kawasan Timur Jawa Timur yang terdiri dari 9 Kabupaten/kota yaitu Kab. Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Kota Probolinggo dan Pasuruan yang telah menyampaikan dengan lengkap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2006-2008 kepada BPK RI.

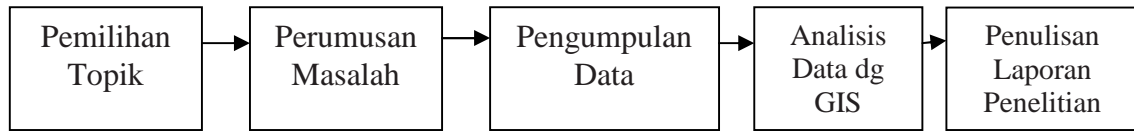
### **4.4 Metoda Analisis Data**

#### **4.5 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Indriantoro dan Supomo, 1999) Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal data atau keadaan atau fenomena. Data yang dipresentasikan kedalam bentuk deskriptif tanpa diolah dengan teknik-teknik analisis lainnya. Dengan kata lain, statistik deskriptif hanya berfungsi menerangkan keadaan, gejala atau persoalan (Hanifah, 2005). Penarikan kesimpulan pada statistik deskriptif (jika ada) hanya ditujukan untuk kumpulan data yang ada dan didasarkan atas ruang lingkup bahasanya. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa frekuensi, tendensi sentral (mean, modus, median), dispersi (deviasi standart) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian (Indriantoro dan Supomo, 1999). Pada penelitian ini menggunakan ukuran nilai maksimum dan minimum.

### 4.6 Kerangka Penyelesaian Masalah

Dalam merencanakan penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka penyelesaian masalah dengan model sebagai berikut:



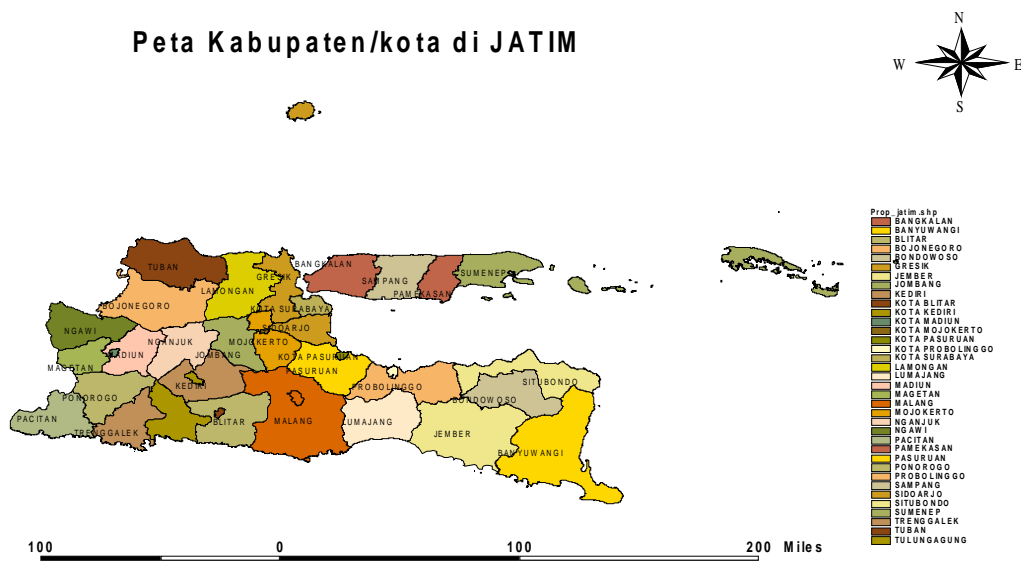
Gambar 4.1 Kerangka penyelesaian masalah

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah mulai dari pemilihan topik yang akan diteliti, setelah melakukan pemilihan topik yang akan diteliti, peneliti mulai melakukan langkah-langkah dalam penentuan masalah-masalah yang akan dikupas. Masalah-masalah tersebut dirumuskan dalam kerangka perumusan masalah. Untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah data terkumpul, maka peneliti mulai melakukan analisis atas data yang telah terkumpul untuk memperoleh informasi atas permasalahan yang ada, memecahkan permasalahan, serta membuat kesimpulan. Analisa dilakukan dengan menggunakan piranti lunak sistem informasi geografi untuk memetakan laporan keuangan di Kabupaten-Kota di Jawa Timur. Setelah analisis data selesai, peneliti mulai melakukan hasil dan pembahasan laporan penelitian.

### 5. Hasil Dan Pembahasan

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa dengan ibu kota Surabaya. Luas wilayahnya 47.922 km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduknya 37.070.731 jiwa (2005). Jawa Timur merupakan wilayah terluas di antara 6 propinsi yang ada di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia setelah Propinsi Jawa Barat.

Gambar 5.1



Batas-batas wilayah Jawa Timur adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan [Samudra Hindia](#) , serta di sebelah barat berbatasan dengan propinsi Jawa Tengah. Wilayah Jawa Timur juga meliputi [Pulau Madura](#), [Pulau Bawean](#), [Pulau Kangean](#) serta sejumlah pulau-pulau kecil di [Laut Jawa](#) dan [Samudera Hindia \(Pulau Sempu dan Nusa Barung\)](#). Pembagian wilayah di Propinsi Jawa Timur terdiri dari wilayah atas 29 kabupaten dan 9 kota, sehingga total pembagian wilayah pemerintahannya berjumlah 38 daerah.

## **5.2 Pemetaan Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota/Kabupaten di daerah Kawasan Timur Jawa Timur Tahun Anggaran 2006-2008**

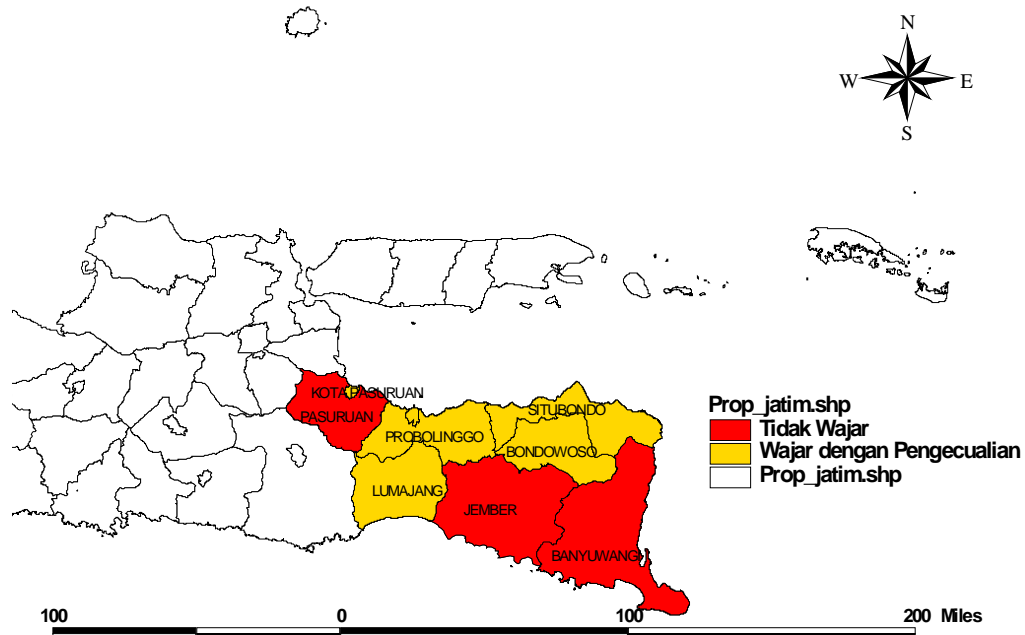
Opini merupakan pendapat yang disampaikan oleh suatu entitas atas hasil pengamatan yang telah dilakukan. Opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu simpulan yang diberikan oleh BPK RI setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Opini yang disampaikan oleh BPK merupakan cerminan dari prestasi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Opini-opini yang muncul tidak serta merta keluar dari pernyataan emosional BPK, akan tetapi melalui proses investigasi serta prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan perundangan sebagai dasar pemeriksaan yang telah ditetapkan. Opini-opini yang disampaikan oleh BPK terhadap LKPD kabupaten/kota terdiri dari wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak menyatakan pendapat/*disclaimer* (D).

Berdasarkan data yang diteliti yaitu laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di daerah Kawasan Timur Jawa Timur tahun anggaran 2006-2008 yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Pada tahun anggaran 2006-2008, seluruh kabupaten/kota yang menyerahkan LKPD kepada BPK RI. Sehingga sesuai dengan metoda penelitian, untuk tahun anggaran 2006 dilakukan penelitian pada 7 LKPD kabupaten dan 2 LKPD kota yang telah menyerahkan laporan kepada BPK RI.

Untuk tahun anggaran 2006 diperoleh data bahwa dari 9 LKPD, tidak ada LKPD yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), 3 LKPD mendapat opini TW yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Pasuruan. Sedangkan sisanya 6 LKPD mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK. Pada tahun anggaran ini tidak ada LKPD yang mendapatkan opini disclaimer (D). Pada gambar 5.2. digambarkan pemetaan opini LKPD di daerah Kawasan Timur Jawa Timur pada tahun anggaran 2006 dengan menggunakan GIS.

Gambar 5.2

## Peta Opini LKPD di daerah Tapal Kuda Jawa Timur T.A 2006

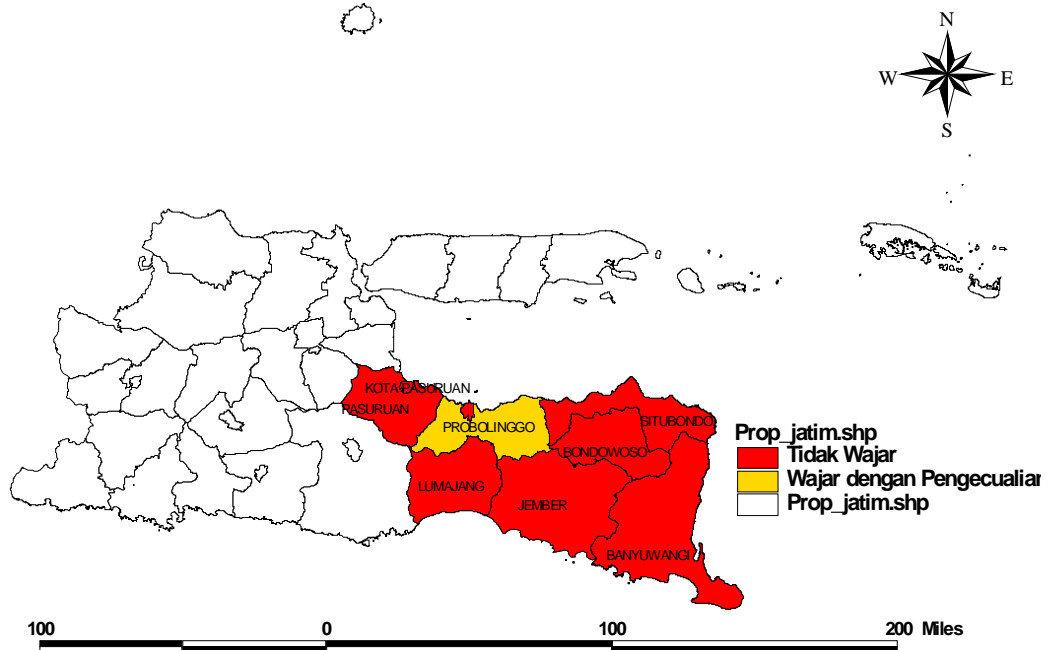


Berdasarkan gambar 5.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2006 ini LKPD dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP) memperoleh prosentase terbanyak yaitu 66,67 % dari 9 kabupaten/kota yang telah menyerahkan laporan kepada BPK RI, dan 14% yaitu dengan opini tidak wajar (TW).

Sementara untuk tahun anggaran 2007 diperoleh data bahwa dari 9 Kabupaten/kota di daerah Kawasan Timur Jawa Timur telah menyampaikan laporan kepada BPK RI secara lengkap. Pada tahun anggaran 2007 ini diperoleh data opini dengan rincian bahwa pada tahun ini tidak ada satupun kabupaten/kota yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan *disclaimer* (D). Untuk opini wajar dengan pengecualian (WDP) hanya 1 LKPD yaitu untuk Kabupaten Probolinggo. Sedangkan sisanya yaitu 8 LKPD Kabupaten/kota mendapat opini tidak wajar (TW). Pada gambar 5.3. dapat dilihat mayoritas daerah memperoleh opini tidak wajar dengan kode warna merah.

Gambar 5.3

## Peta Opini LKPD di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur T.A. 2007

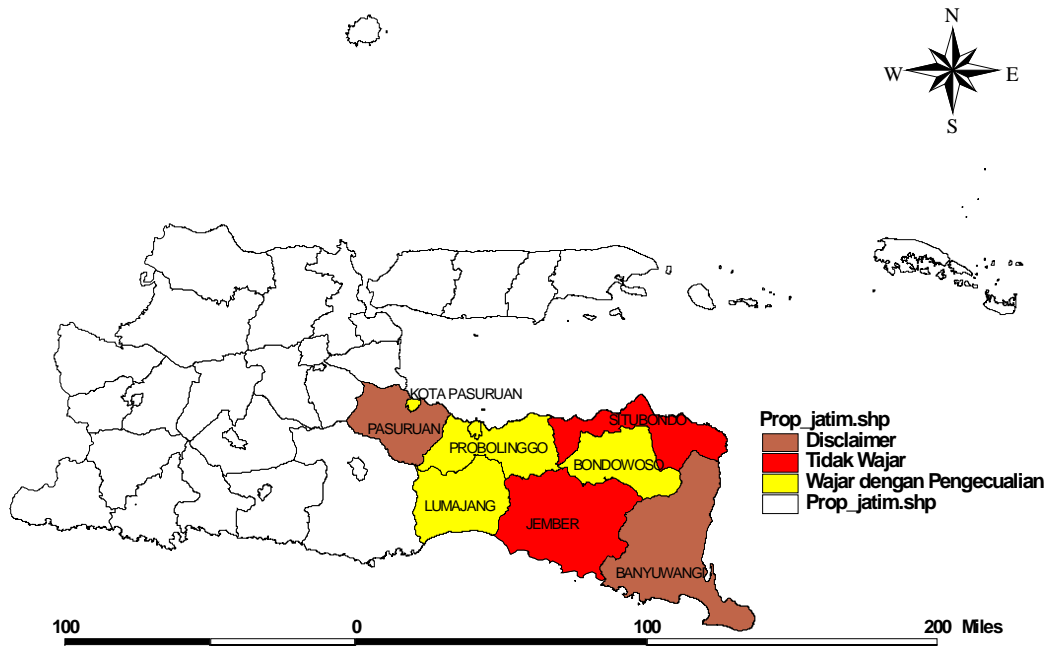


Berdasarkan gambar 5.3, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2007 LKPD dengan opini tidak wajar (TW) memperoleh prosentase terbanyak yaitu 88,89% dari 9 kabupaten/kota yang telah menyerahkan laporan kepada BPK RI, selanjutnya terbanyak kedua dengan prosentase 11,11% yaitu dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan tidak satupun LKPD kabupaten/kota yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan *disclaimer* (D) atau memperoleh prosentase 0%.

Di tahun anggaran 2008 diperoleh data bahwa dari 9 kabupaten/kota di daerah Kawasan Timur Jawa Timur telah menyampaikan laporan kepada BPK RI secara lengkap. Pada tahun anggaran 2008 ini diperoleh data opini dengan rincian bahwa pada tahun ini tidak ada satupun kabupaten/kota yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Untuk opini wajar dengan pengecualian (WDP) terdapat 5 LKPD.

Gambar 5.4

## Peta Opini LKPD di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur T.A 2008



Opini tidak wajar (TW) 2 LKPD yaitu Kabupaten Jember dan Kabupaten Situbondo. Sedangkan untuk opini *disclaimer* (D) terdapat 2 LKPD, yaitu Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Pasuruan. Pada gambar 5.4 digambarkan peta pencapaian opini LKPD Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2008 dengan menggunakan GIS.

Berdasarkan gambar 5.4, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2008 LKPD dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP) memperoleh prosentase terbanyak yaitu 55,56% dari 9 kabupaten/kota yang telah menyerahkan laporan kepada BPK RI, selanjutnya terbanyak kedua dengan prosentase 22,22% yaitu dengan opini *disclaimer* (D) dan opini tidak wajar (TW).

### 5.3 Temuan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006-2008

Temuan merupakan suatu kasus atau keadaan yang diperoleh dari hasil pengamatan. Temuan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah hal-hal yang ditemukan oleh BPK dari aktifitas pemeriksaan yang perlu dikaji ulang kembali serta menjadi evaluasi bagi entitas pemerintah daerah. Tujuan daripada temuan BPK RI adalah sebagai alat evaluasi poin-poin penting yang memerlukan pengkajian ulang pada laporan periode berikutnya oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Dan yang paling krusial adalah untuk mengetahui ada tidaknya kecurangan serta penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan yang mengarah ke unsur tindak pidana. Dalam hal ini temuan-temuan yang diteliti adalah temuan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang

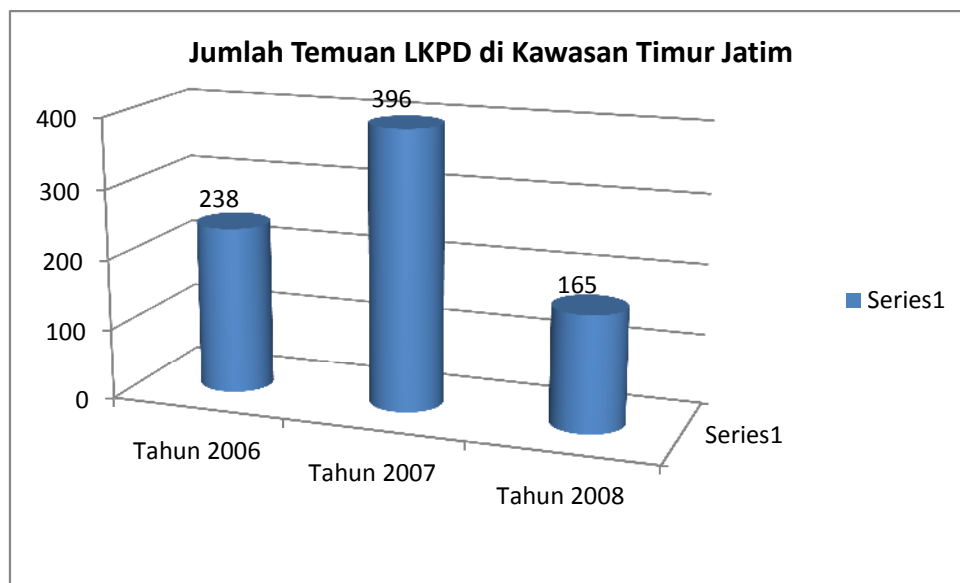


termuat dalam laporan atas kepatuhan hasil pemeriksaan BPK RI Kabupaten/kota di daerah Kawasan Timur i Jawa Timur tahun anggaran 2006-2008.

Temuan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tiap tahun berbeda tergantung bagaimana pencapaian kinerja pengelolaan keuangan daerah masing-masing. Temuan ini didasarkan atas pemeriksaan terhadap unsur-unsur laporan keuangan pemerintah daerah antara lain laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, serta kepatuhannya terhadap perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui ada tidaknya kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan yang berindikasi unsur tindak pidana.

Dalam laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di daerah Kawasan Timur Jawa Timur tahun anggaran 2006-2008 yang telah diperiksa oleh BPK, jumlah temuan tiap tahun tiap daerah bervariasi dalam hal objek temuannya.

**Gambar 5.5**

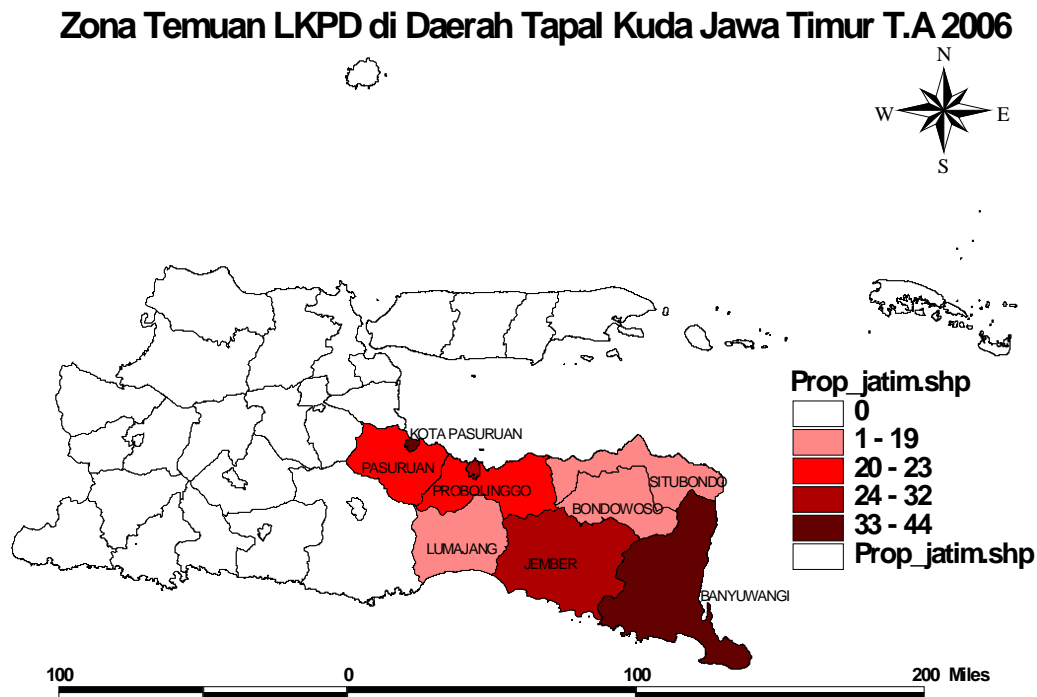


Sedangkan pada gambar 5.5 merupakan penyajian atas total temuan pada masing-masing tahun anggaran. Pada gambar tersebut peneliti dapat membandingkan jumlah temuan antar tahun (2006-2008). Digambar tersebut dapat kita lihat bahwa terjadi perbedaan jumlah temuan serta terjadinya fluktuasi temuan selama 3 tahun anggaran. Pada tahun anggaran 2006, BPK RI memperoleh 238 temuan dari total 9 Kabupaten/kota di daerah Kawasan Timur Jawa Timur. Pada tahun 2007 terjadi peningkatan jumlah temuan yakni 396 temuan atau terjadi peningkatan sejumlah 158 temuan dari tahun 2006. Kemudian untuk tahun anggaran 2008 terjadi penurunan jumlah temuan yaitu 165 item temuan. Dari tiga tahun anggaran tersebut, dapat diketahui bahwa tahun 2007 merupakan tahun anggaran dengan jumlah temuan tertinggi dan pada tahun 2008 merupakan tahun anggaran dengan jumlah temuan terendah.

Dalam tiap tahun anggaran, terdapat beberapa pokok temuan yang menjadi temuan-temuan terbanyak atau mendominasi dalam 1 periode anggaran pada suatu laporan keuangan pemerintah daerah. Pokok temuan yang paling sering ditemukan merupakan masalah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk

melakukan koreksi dan evaluasi di tahun anggaran yang akan datang. Dari identifikasi terhadap hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI terhadap kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur, ditemukan beberapa jenis temuan yang menjadi suatu masalah dari tahun ke tahun.

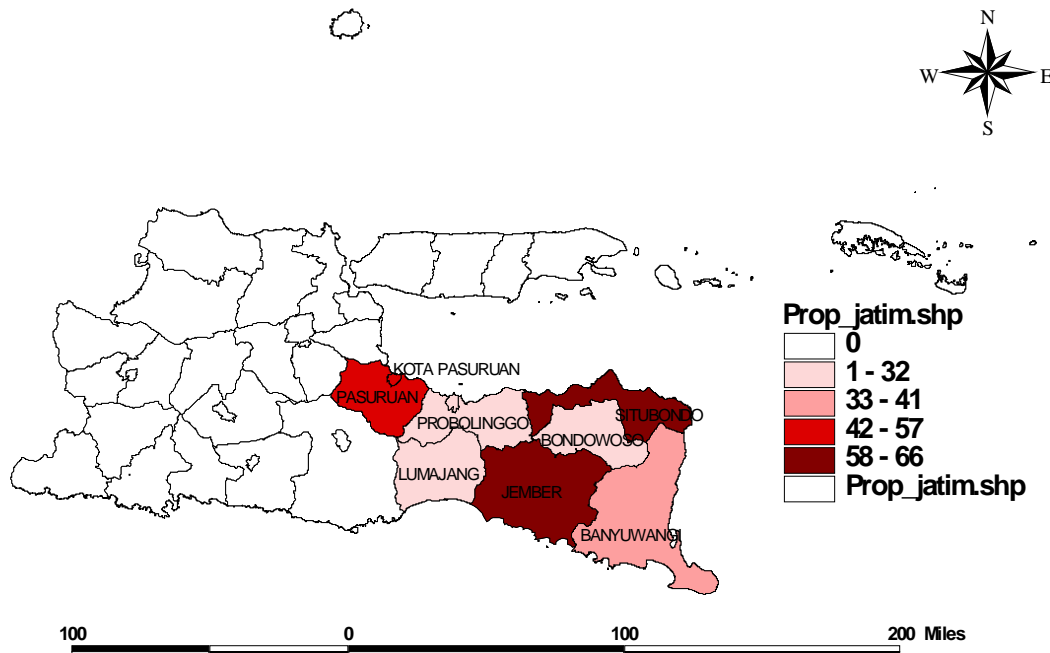
Gambar 5.6



Dalam gambar 5.6 dapat dilihat bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2006 ditemukan 238 item masalah dari total 9 kabupaten/kota yang menyerahkan laporan dan menjalani pemeriksaan oleh BPK RI. Daerah dengan kawasan terang merupakan daerah dengan jumlah temuan paling sedikit. Sedangkan daerah dengan kawasan yang gelap merupakan daerah dengan temuan paling banyak. Permasalahan pengelolaan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan merupakan masalah dengan jumlah temuan tertinggi yakni 33 atau 14 % dari jumlah total temuan pada tahun 2006. Jumlah temuan terbanyak kedua adalah mengenai penganggaran serta realisasi belanja modal dan permasalahan anggaran serta realisasi belanja operasional pejabat tinggi negara yang masing-masing terdapat 24 temuan atau 10 % dari jumlah total temuan tahun 2006. Temuan terbanyak ketiga yaitu mengenai penganggaran serta realisasi belanja perjalanan dinas atau studi banding pemerintahan daerah yaitu 12 temuan atau 5 % dari total temuan di tahun anggaran 2006

Gambar 5.7

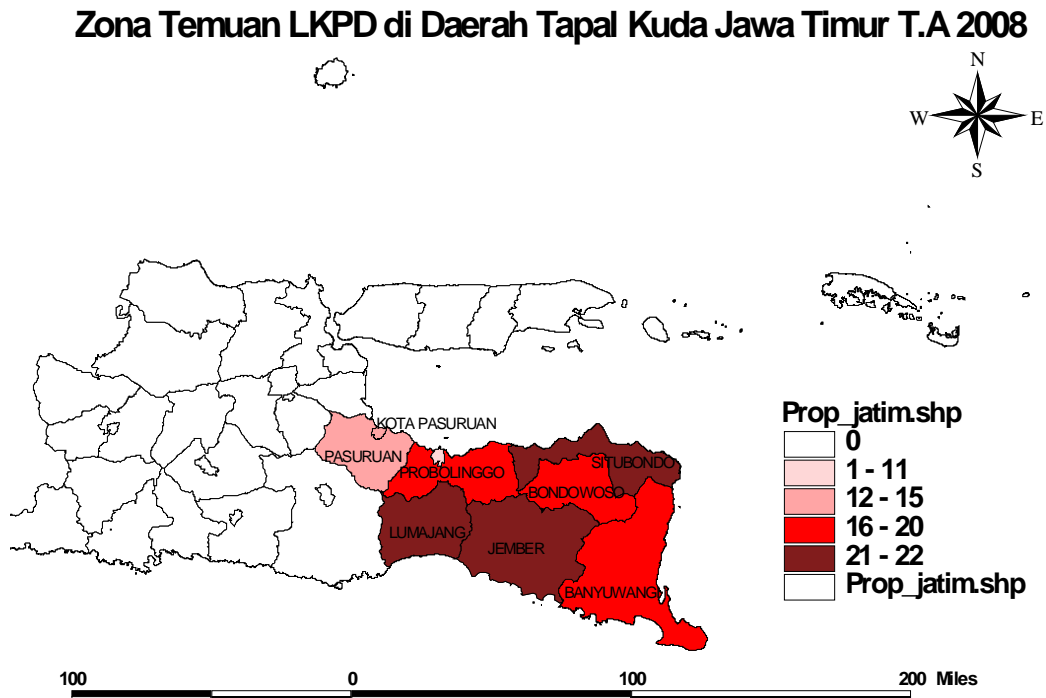
## Zona Temuan LKPD di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur T.A 2007



Untuk tahun 2007, seluruh kabupaten/kota di daerah Kawasan Timur Jawa Timur telah menyerahkan LKPD kepada BPK RI yakni 9 LKPD dengan jumlah total temuan 396. Seperti pada gambar 5.7 Daerah dengan kawasan terang merupakan daerah dengan jumlah temuan paling sedikit. Sedangkan daerah dengan kawasan yang gelap merupakan daerah dengan temuan paling banyak. Berbeda dengan tahun anggaran 2006, di tahun anggaran 2007 ini jumlah temuan terbanyak tentang permasalahan penganggaran serta realisasi belanja modal yaitu 32 temuan atau 8 % dari total temuan tahun 2007. Terbanyak kedua mengenai pengelolaan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak sesuai ketentuan yaitu 24 temuan atau 6 % dari total temuan. Untuk terbanyak ketiga adalah tentang pengelolaan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dengan jumlah temuan 20 atau 5% dari total temuan di tahun 2007.

Temuan di tahun 2008 juga berbeda dengan temuan 2 tahun anggaran sebelumnya. Temuan terbanyak mengenai pengelolaan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dengan jumlah 12 temuan atau 7 % dari total temuan tahun 2008. Temuan terbanyak kedua mengenai permasalahan penganggaran serta realisasi belanja modal yaitu 10 temuan atau sekitar 6,1 %. Terbanyak ketiga temuan tentang pengelolaan atas penerimaan retribusi dan belum adanya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI masing-masing 9 temuan atau sekitar 6 %. Dalam gambar 5.8 dapat dijelaskan bahwa kota probolinggo merupakan daerah dengan jumlah temuan yang paling sedikit diantara daerah-daerah yang lain diikuti oleh Kabupaten dan Kota Pasuruan.

Gambar 5.8



Dalam 3 tahun anggaran yang diteliti, peneliti dapat menyimpulkan dari hasil identifikasi data temuan BPK RI di peroleh total 799 temuan selama 3 tahun anggaran (2006-2009). Temuan terbanyak adalah mengenai masalah pengelolaan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dengan jumlah 65 atau sekitar 8,1% dari total temuan selama 3 tahun anggaran. Masalah pengelolaan terhadap anggaran dan realisasi belanja bagi hasil di dalam laporan keuangan merupakan termasuk didalam jenis pengeluaran. Masalah-masalah didalam belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ini misalnya adalah permasalahan mengenai bantuan keuangan terhadap partai politik di daerah, bantuan keuangan kepada dinas terkait, bantuan keuangan untuk lembaga kemasyarakatan di daerah, serta belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang lainnya.

Temuan terbanyak kedua adalah masalah penganggaran serta realisasi belanja modal yaitu 64 temuan atau sekitar 8 % dari total temuan. Permasalahan atas pengelolaan anggaran dan realisasi belanja modal ini termasuk di dalamnya adalah pengelolaan atas belanja modal pengadaan aset, kesalahan pembebanan belanja modal kedalam jenis belanja yang lain, penyalahgunaan anggaran belanja modal untuk direalisasikan ke dalam pemenuhan pengeluaran yang lainnya yang tidak sesuai ketentuan, dan sebagainya.

Untuk temuan terbanyak ketiga adalah mengenai permasalahan anggaran serta realisasi belanja operasional pejabat tinggi negara yaitu 40 temuan atau sekitar 5 % dari total temuan selama 3 tahun anggaran yang diteliti. Termasuk di dalamnya merupakan kesalahan peruntukan dana belanja operasional, tunjangan, bonus, rapel, serta bantuan dana lainnya yang menyebabkan ketidakpatutan didalam penganggaran serta realisasinya.

Pada laporan keuangan pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota memiliki jumlah temuan yang tidak sama, hal ini bergantung bagaimana pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh masing-masing daerah yang tercermin pada hasil pelaporannya. Untuk kabupaten/kota selama 3 tahun anggaran secara berturut-turut mengalami penurunan jumlah temuan terdapat 1 kabupaten yaitu Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan untuk 8 daerah yang lain pada umumnya mengalami fluktuasi.

Kabupaten/kota dengan jumlah temuan tertinggi selama 3 tahun berturut-turut yaitu (3 tertinggi):

1. Kabupaten Jember (119 temuan)
2. Kota Pasuruan (112 temuan)
3. Kabupaten Situbondo (106 temuan)

Kabupaten/kota dengan jumlah temuan terendah selama 3 tahun berturut-turut yaitu (3 terendah):

1. Kabupaten Bondowoso (61 temuan)
2. Kabupaten Lumajang (67 temuan)
3. Kabupaten Probolinggo (69 temuan)

Dari data 3 daerah dengan jumlah temuan tertinggi dan 3 daerah dengan jumlah temuan terendah, peneliti juga melihat temuan yang selalu muncul secara berturut-turut di setiap tahunnya, ini menunjukkan belum adanya perhatian khusus atas temuan-temuan BPK pada tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan LKPD Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur untuk tahun 2006-2008 yang telah diperiksa oleh BPK, untuk temuan di setiap daerah dapat diketahui bahwa 1 item temuan di tahun yang satu dengan 2 tahun berikutnya masih ditemukan meskipun jumlahnya ada yang mengalami kenaikan, penurunan, atau bahkan tidak ditemukan lagi temuan yang sama di tahun berikutnya. Begitu juga dengan item-item temuan yang lainnya. Untuk temuan pada LKPD kabupaten dan kota di daerah Kawasan Timur Jawa Timur tahun anggaran 2006-2008 menunjukkan bahwa temuan temuan setiap item di setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan jumlah yang ditemukan, meskipun masih ada juga yang mengalami penurunan atau tidak ditemukan lagi temuan yang sama di tahun berikutnya.

## 6. Pembahasan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab Kepala Daerah setempat. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di suatu daerah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah tersebut di depan DPRD. Pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan wujud dari akuntabilitas serta transparansi pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah selama periode pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu cerminan pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam suatu laporan. Dimana

didalamnya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam menyusun serta melaksanakan pengelolaan keuangan daerah tersebut, pemerintah harus senantiasa mengikuti perkembangan perundang-undangan yang ada sebagai dasar hukum penyusunan LKPD serta dalam menyusun kebijakan keuangan daerah.

LKPD yang telah disusun tersebut wajib dilaporkan dan diserahkan kepada BPK RI guna diperiksa kepatuhan dan kepatutannya. Kepatuhan dan kepatutan atas LKPD Kabupaten/daerah tergambar dari temuan-temuan yang ada setelah dilakukan oleh BPK RI. Dari temuan itu, BPK akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas temuan pada periode anggaran yang akan datang. Di dalam pemeriksaan, BPK akan memberikan opini atas LKPD tersebut. Opini dari hasil pemeriksaan tersebut merupakan penilaian dari BPK RI atas kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang ada di pemerintahan tersebut.

Opini merupakan pendapat yang diberikan oleh BPK RI atas hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten/kota. Di dalam penelitian 3 tahun anggaran atas LKPD Kabupaten/kota di daerah Kawasan Timur Jawa Timur dari tahun 2006-2008 perkembangan opini atas hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan keadaan yang berbeda-beda di tiap kota ataupun Kabupaten. Pada tahun anggaran 2006. Opini hasil pemeriksaan BPK RI pada tahun 2006 untuk daerah yang memperoleh opini tidak wajar (TW) yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Pasuruan. Untuk sisanya 6 daerah memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) serta tidak ada daerah yang memperoleh opini *Disclaimer* (D).

Selama tahun anggaran 2007, tidak ada daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP) 1 daerah yakni Kabupaten Probolinggo, sementara itu pada tahun anggaran ini jumlah daerah dengan opini tidak wajar (TW) yaitu mencapai 8 daerah. Pada tahun anggaran 2008, tidak ada satu daerah pun yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), 2 daerah dengan opini tidak wajar (TW) yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo. 2 daerah dengan opini *disclaimer* (D) yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan. sedangkan sisanya 5 daerah dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Selama 3 tahun anggaran (2006-2008) daerah dengan prestasi opini yang relatif buruk adalah Kabupaten Jember dengan opini tidak wajar. Dimana selama 3 tahun anggaran berturut-turut mendapatkan opini tidak wajar. Daerah dengan prestasi yang cukup baik yakni Kabupaten Probolinggo selama 3 tahun berturut-turut konsisten dengan prestasi opini wajar dengan pengecualian (WDP). Sedangkan untuk daerah-daerah lain merupakan daerah dengan opini yang berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Dalam melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten/kota di daerah Kawasan Timur Jawa Timur, BPK RI dalam melaporkan hasil pemeriksaan tersebut juga menjelaskan temuan yang di dapat dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Temuan tersebut menjelaskan tentang ketidakpatuhan laporan keuangan daerah. Dalam penelitian terhadap LKPD 3 tahun anggaran ini, peneliti dapat menyimpulkan tentang jumlah temuan yang di temukan dari hasil pemeriksaan BPK RI terhadap masing-masing Kabupaten atau kota. Tahun anggaran 2006 ditemukan 238 masalah. Permasalahan pengelolaan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan merupakan masalah dengan jumlah temuan tertinggi yakni 14% dari jumlah total temuan pada tahun 2006. Jumlah temuan terbanyak kedua

adalah mengenai penganggaran serta realisasi belanja modal dan permasalahan tentang penganggaran serta realisasi belanja operasional pejabat tinggi negara yang masing-masing terdapat 10% dari jumlah total temuan tahun 2006. Temuan terbanyak ketiga yaitu mengenai penganggaran serta realisasi belanja perjalanan dinas atau studi banding pemerintahan daerah yaitu 5 % dari total temuan di tahun anggaran 2006. Dari tiga teratas peringkat banyaknya jumlah temuan, dapat diketahui bahwa ketiga temuan tersebut merupakan unsur daripada pengeluaran daerah atau belanja daerah. Kabupaten/kota yang memperoleh jumlah temuan terbesar adalah Kabupaten Banyuwangi 44 temuan, sedangkan jumlah temuan terkecil adalah Kabupaten Bondowoso dengan 13 temuan.

Untuk tahun 2007 total temuan sebanyak 396. Di tahun anggaran 2007 ini jumlah temuan terbanyak adalah tentang permasalahan penganggaran serta realisasi belanja modal yaitu sebanyak 8% dari total temuan di tahun 2007. Terbanyak kedua mengenai pengelolaan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak sesuai ketentuan yaitu 6% dari total temuan. Untuk terbanyak ketiga adalah tentang pengelolaan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dengan jumlah temuan 5% dari total temuan di tahun 2007. Dari tiga teratas peringkat banyaknya jumlah temuan, maka bisa diketahui terdapat 2 unsur belanja daerah, dan 1 unsur penerimaan daerah. Kabupaten/kota yang memperoleh temuan terbesar adalah Kabupaten Situbondo 66 temuan, dan dengan jumlah temuan terkecil adalah Kabupaten Bondowoso 26 temuan.

Sedangkan di tahun 2008 total temuan sebanyak 165. Temuan terbanyak adalah mengenai pengelolaan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dengan jumlah 7% dari total temuan tahun 2008. Temuan terbanyak kedua mengenai permasalahan penganggaran serta realisasi belanja modal yaitu 6,1%. Terbanyak ketiga temuan tentang pengelolaan atas penerimaan retribusi serta tentang belum adanya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI masing-masing 6 % dari total temuan. Disini dapat kita lihat bahwa terdapat 2 unsur belanja serta 1 unsur pendapatan daerah juga 1 mengenai hasil rekomendasi.

Dalam 3 tahun anggaran yang diteliti di peroleh total 799 temuan selama 3 tahun anggaran (2006-2008). Temuan terbanyak adalah mengenai masalah pengelolaan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sekitar 8,1 % dari total temuan selama 3 tahun anggaran. Temuan terbanyak kedua adalah masalah penganggaran serta realisasi belanja modal yaitu sekitar 8 % dari total temuan. Untuk temuan terbanyak ketiga adalah mengenai permasalahan anggaran serta realisasi belanja operasional pejabat tinggi negara yaitu sekitar 5 % dari total temuan selama 3 tahun anggaran yang diteliti. Dapat diketahui bahwa ketiga jenis temuan tersebut merupakan unsur daripada pengeluaran/belanja daerah. Selama 3 periode anggaran dari tahun 2006-2008, Kabupaten Jember merupakan daerah dengan jumlah temuan tertinggi di Propinsi Jawa Timur yaitu dengan 119 temuan, sedangkan jumlah temuan terendah selama 3 tahun anggaran adalah Kabupaten Bondowoso 61 temuan.

Berdasarkan data LKPD yang telah diperiksa oleh BPK RI, menunjukkan bahwa untuk setiap item temuan, setiap tahun di setiap daerah jumlahnya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Meskipun ada beberapa daerah pada item-item tertentu jumlahnya mengalami kenaikan, akan tetapi jumlahnya sangat sedikit. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang cukup di tiap daerah setiap tahunnya dalam melakukan evaluasi serta koreksi terhadap pengelolaan keuangan dari tahun ketahunnya.

## **7. Simpulan, Keterbatasan dan Saran**

### **7.1 Simpulan**

Berdasarkan identifikasi data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa :

1. Dalam penelitian LKPD kabupaten/kota di daerah Kawasan Timur Jawa Timur, 3 tahun anggaran yaitu dari tahun 2006-2008 dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi fluktuasi opini yang diperoleh oleh masing-masing daerah. Kabupaten Jember merupakan kabupaten dengan prestasi yang buruk selama 3 tahun anggaran. Kabupaten ini selama 3 tahun berturut-turut mendapatkan opini dari BPK RI berupa tidak wajar (TW), sedangkan daerah dengan prestasi baik adalah Kabupaten Probolinggo selama 3 tahun berturut-turut konsisten dengan prestasi opini wajar dengan pengecualian (WDP).
2. Setelah melakukan identifikasi terhadap temuan BPK RI yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan, dalam 3 tahun anggaran yang diteliti di peroleh total 799 temuan selama tahun anggaran 2006-2009. Temuan terbanyak adalah mengenai masalah pengelolaan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan diikuti temuan masalah penganggaran serta realisasi belanja modal. Untuk temuan terbanyak ketiga adalah mengenai permasalahan anggaran serta realisasi belanja operasional pejabat tinggi negara. Dapat diketahui bahwa ketiga jenis temuan tersebut merupakan unsur pengeluaran/belanja daerah. Selama 3 periode anggaran dari tahun 2006-2008, Kabupaten Jember merupakan daerah dengan jumlah temuan tertinggi di daerah Kawasan Timur Jawa Timur, sedangkan jumlah temuan terendah selama 3 tahun anggaran adalah Kabupaten Bondowoso.

### **7.2 Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Cakupan sampel yang hanya kabupaten dan kota di daerah Kawasan Timur Jawa Timur, tidak melakukan perbandingan dengan LKPD di luar daerah Kawasan Timur Jawa Timur.
2. Dalam penelitian ini belum menyajikan analisis tentang kualitas opini apa berhubungan dengan banyaknya jumlah temuan.

### **7.3 Saran**

Dari keterbatasan penelitian ini, maka dapat diambil saran untuk penelitian mendatang antara lain:

1. Diharapkan dalam penelitian mendatang dapat memperluas cakupan sampel penelitian seperti melakukan perbandingan dengan kabupaten/kota yang ada di propinsi di luar Pulau Jawa, misalkan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam atau propinsi yang lain. Agar dapat dilakukan perbandingan antara kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur dengan kabupaten/kota di propinsi lain yang mempunyai perbedaan potensi dengan Jawa Timur
2. Untuk menyajikan pula tentang ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara kualitas opini dengan jumlah temuan yang diperoleh.



---

**Daftar Pustaka**

- Abdullah, Sukriy. 2006. *perilaku oportunistik anggota legislative dalam penganggaran daerah*. Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga
- Brusca, I, and Condor V. 2001. *Financial Analysis on Local Administration*. Financial Review, XXX (IQS): 475-503
- Gujarati, D.N. 2003. *Basic Econometrics* (4<sup>th</sup> edition). New York: McGraw-Hill.
- Hair, J.F.Jr., W.C. Black, B.J. Babin, R.E. Anderson, dan R.L. Tatham. 2006. *Multivariate Data Analysis* (6<sup>th</sup> edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Holtz-Eakin, D. 2001. *Bond Market Condition and State-local Capital Spending*. National Tax Journal, 44 (4): 105-120
- Indriantoro, N. dan B. Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta. BPFE.
- Jogiyanto, 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, Yogyakarta: BPFE
- Kiewiet, R. and Szalaky, R. 1996. *Constitutional limitations on borrowing: an analysis of state bonded indebtedness*. Journal of Law, Economic and Organization, 12 (1): 62-97
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mankiw, Gregory. 2005. *Macro economics, forth edition*. New York: McGraw Hill
- Mceachen, W. A. 1978. *Collective Decision Rules and local Debt Choice: A test of the Median-Voter Hypothesis*. National Tax Journal, 31 (2): 129-136
- Metcalf, G. E. 2001. *The Role of Federal Taxation in the Supply of Municipal Bond: Eidence from Municipal Government*. National Tax Journal, 44 (4): 57-70
- Musgrave, R. A. and Musgrave, P.B. 1989. *Publik Finance Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill
- Oates, W. E. 1972. *Fiscal Federalisme*. New York: Harcourt Brace Jovanovich
- Pogue, T. F. 1970. *The Effect of Debt Limits: Some New Evidence*. National Tax Journal, 23 (1): 36-49
- Prihatiningtyas. 2008. Analisis Pengaruh Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. JAUJ Vol.2 No.3
- Rivers, M. J. and Yates, B. M. 1997. *City Size and Geograpich Segmentation in the Minicipal Bond Market*. The Quarterly Review of Economic and Finance, 37 (3): 633-645
- Sumiyati. 2006. *Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Masa Transisi*. Jakarta
- Wibisono, T., Hendrawan P.S., Taufik Kurrohman. 2009. *Mengupas Tuntas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Jatim*. Tidak dipublikasikan.
- Zehms, K. M. (1991). *Proposed Finacial Ratios for Use Analysis of Municipal Annual Financial Report*. The Government Accountant Journal, XL (3): 79